

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim
Assalamualaikum Wr.Wb

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 telah selesai disusun. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kota Cimahi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Wali Kota Cimahi. Selain itu laporan ini memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2020.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LKIP di tahun mendatang.

Akhir kata semoga LKIP Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 ini menjadi bagian dari upaya untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan akuntabilitas kinerja secara terukur dan akuntabel, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah-Nya bagi kita semua, agar kita tetap memiliki kekuatan, kemudahan dan keselamatan dalam menjalankan tugas dengan baik dan profesional.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Cimahi, Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH,

DIKDIK S. NUGRAHAWAN, S.Si., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720520 199901 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 menyajikan informasi target dan capaian sasaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Cimahi berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Cimahi 2017- 2022. Hasil capaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Indikator Nilai AKIP Kota mendapat Predikat B sesuai dengan target yang ditetapkan;
2. Indikator nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) mendapat prestasi Sangat Tinggi sesuai dengan target yang ditetapkan;
3. Indikator Nilai Indeks Reformasi Birokrasi mendapat Kategori CC dibawah target yang ditetapkan;
4. Indikator Nilai Rata-rata IKM Kota tercapai 81,57 dari target indeks 81,56;

Kejadian Luar Biasa (KLB) pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia meliputi Jawa Barat dan mewabah juga ke Kota Cimahi membuat Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang mana hal ini menyebabkan rasionalisasi anggaran program dan kegiatan untuk *refocusing* penanganan pandemi Covid-19.

Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020 melaksanakan 5 program dan 58 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp24.437.843.771,- dan terserap sebesar Rp21.690.030.682,- sehingga Sekretariat Daerah Kota Cimahi melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp2.747.813.089,- atau 88,75%

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 ini disusun sebagai upaya evaluasi pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Cimahi¹ sepanjang Tahun 2020 dan upaya perbaikan kinerja untuk tahun-tahun mendatang dengan memegang prinsip akuntabilitas yang pada tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan kinerja ini juga merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun tujuan penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai capaian target kinerja;
2. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Cimahi dalam pencapaian target sasaran Tahun Anggaran 2020 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;

¹ Sekretariat Daerah Kota Cimahi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 207 Tahun 2016) dan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 382 Tahun 2017).

3. Sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Cimahi pada tahun yang akan datang.

I.2. Dasar Hukum

Pelaksanaan penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 ini memperhatikan kepada Peraturan Perundang-undangan yang melandasi, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 207 Tahun 2016);

9. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325);
10. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Cimahi;
11. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 382);

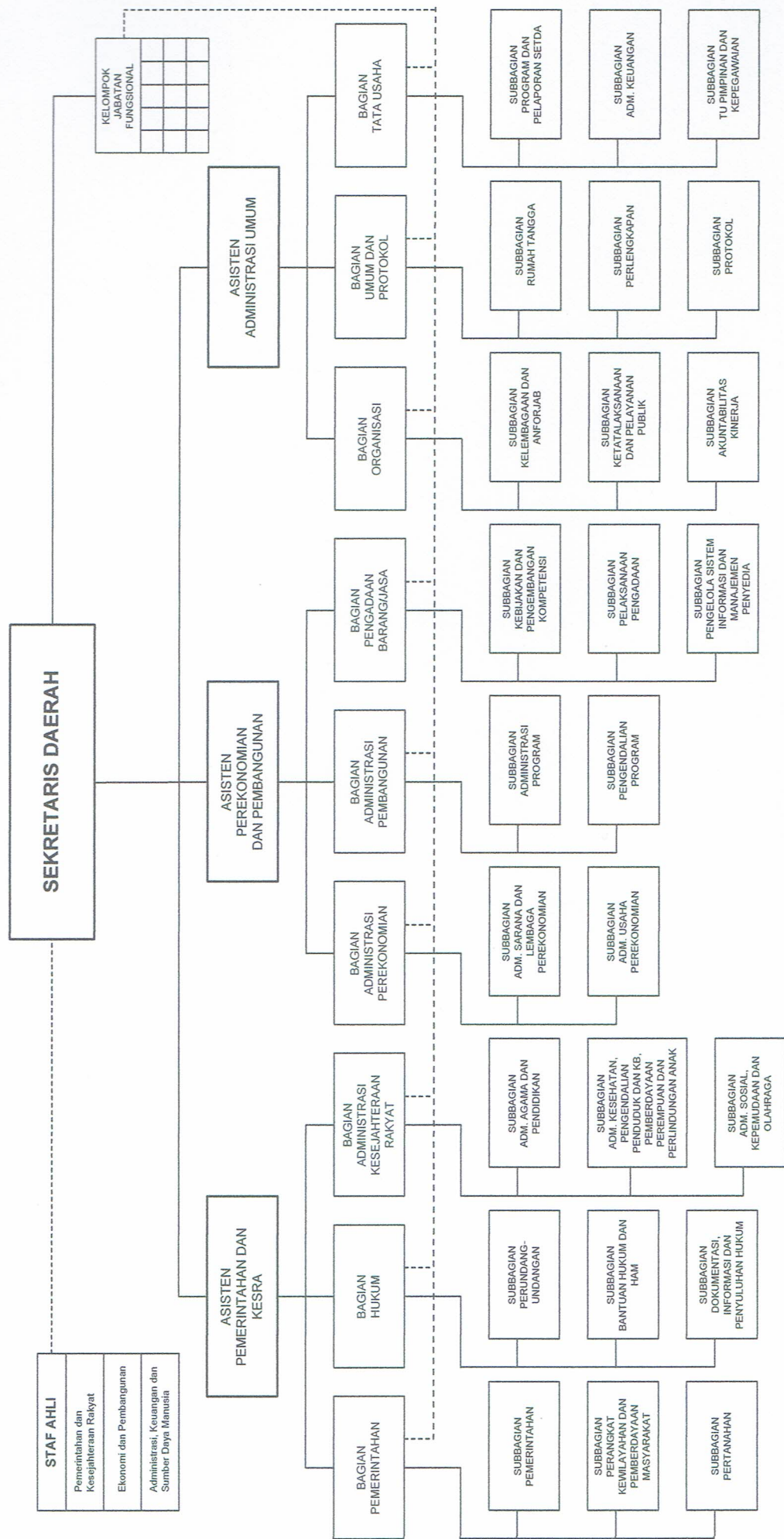
I.3. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Cimahi

Sekretariat Daerah Kota Cimahi, merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

I.3.1 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Cimahi sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 34 Tahun 2017 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIMAHI



Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Cimahi terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a. Bagian Pemerintahan :
 - 1) Sub Bagian Pemerintahan;
 - 2) Sub Bagian Perangkat Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3) Sub Bagian Pertanahan.
 - b. Bagian Hukum :
 - 1) Sub Bagian Perundang – undangan;
 - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan Penyuluhan Hukum.
 - c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat :
 - 1) Sub Bagian Administrasi Agama dan Pendidikan;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 3) Sub Bagian Administrasi Sosial, Kepemudaan dan Olahraga
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi
 - a. Bagian Administrasi Perekonomian :
 - 1) Sub Bagian Administrasi Sarana dan Lembaga Perekonomian;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Usaha Perekonomian.
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan :
 - 1) Sub Bagian Administrasi Program;
 - 2) Sub Bagian Pengendalian Program.
 - c. Bagian Pengadaan Barang/Jasa
 - 1) Sub Bagian Advokasi dan Pembinaan Pengadaan;
 - 2) Sub Bagian Informasi, teknologi Pengadaan;
 - 3) Sub Bagian Pelayanan Pengadaan;
4. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
 - a. Bagian Organisasi :
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan;

- 2) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;
 - 3) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja.
- b. Bagian Umum dan Protokol:
- 1) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 2) Sub Bagian Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Protokol.
- c. Bagian Tata Usaha :
- 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian TU Pimpinan dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Administrasi Keuangan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional

I.3.2 Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah

Sesuai Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi, Sekretariat Daerah mempunyai tugas, fungsi dan uraian tugas sebagai berikut:

a. Tugas Sekretariat Daerah

Memimpin, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah.

b. Fungsi Sekretariat Daerah

1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota dan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

1. Bagian Pemerintahan

Tugas Bagian Pemerintahan adalah merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang pemerintahan.

Fungsi Bagian Pemerintahan yaitu:

- a. Penyusunan bahan kebijakan pemerintahan daerah dibidang pemerintahan
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas yang meliputi pemerintahan perangkat kewilayahan, pemberdayaan masyarakat dan pertanian;
- c. Pengaturan program dan kegiatan yang meliputi pemerintahan, perangkat kewilayahan, pemberdayaan masyarakat dan pertanian;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan yang meliputi pemerintahan, perangkat kewilayahan, pemberdayaan masyarakat dan pertanian;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bagian Hukum

Tugas Bagian Hukum adalah merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang hukum.

Fungsi Bagian Hukum yaitu:

- a. Penyusunan bahan kebijakan pemerintahan daerah dibidang hukum;
- b. Penyelenggaraan tugas dan pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang hukum yang meliputi perundang-undangan, jaringan dokumentasi, informasi dan penyuluhan, serta bantuan hukum dan HAM;
- c. Pengaturan program dan kegiatan hukum yang meliputi perundang-undangan, jaringan dokumentasi, informasi dan penyuluhan,serta bantuan hukum dan HAM;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan yang meliputi perundang-undangan, jaringan dokumentasi, informasi dan penyuluhan, serta bantuan hukum dan HAM;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Tugas Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat.

Fungsi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat yaitu:

- a. Penyusunan bahan kebijakan pemerintahan daerah dibidang kesejahteraan rakyat;
- b. Pengaturan program bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi administrasi agama, pendidikan, administrasi kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan administrasi sosial, kepemudaan dan olahraga;
- c. Penyelenggaraan tugas dan pengoordinasian bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi administrasi agama,

pendidikan, administrasi kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan administrasi sosial, kepemudaan dan olahraga;

- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan organisasi yang meliputi administrasi agama, pendidikan, administrasi kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan administrasi sosial, kepemudaan dan olahraga;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bagian Administrasi Perekonomian

Tugas Bagian Administrasi Perekonomian adalah merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang administrasi perekonomian.

Fungsi Bagian Administrasi Perekonomian yaitu:

- a. Penyusunan bahan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Administrasi Perekonomian;
- b. Penyelenggaraan tugas dan pengoordinasian bidang Administrasi Perekonomian yang meliputi Administrasi Sarana dan Lembaga Perekonomian serta Administrasi Usaha Perekonomian;
- c. Pengaturan program dan kegiatan yang meliputi Administrasi Sarana dan Lembaga Perekonomian, Administrasi Usaha Perekonomian;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi Administrasi Sarana dan Lembaga Perekonomian, Administrasi Usaha Perekonomian;

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bagian Administrasi Pembangunan

Tugas Bagian Administrasi Pembangunan adalah merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang administrasi pembangunan.

Fungsi Bagian Administrasi Pembangunan yaitu:

- a. Penyusunan bahan kebijakan pemerintahan daerah dibidang administrasi pembangunan;
- b. Penyelenggaraan tugas dan pengoordinasian bidang administrasi pembangunan yang meliputi Administrasi Program dan Pengendalian Program;
- c. Pengaturan program dan kegiatan yang meliputi Administrasi Program dan Pengendalian Program;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi administrasi program dan pengendalian program;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Tugas Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang pengadaan barang/jasa.

Fungsi Bagian Pengadaan Barang/Jasa yaitu:

- a. Penyusunan bahan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengadaan barang/jasa;

- b. Penyelenggaraan tugas dan pengoordinasian bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- c. Pengaturan program dan kegiatan yang meliputi pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi pengelolaan pengadaan barang/ jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bagian Organisasi

Tugas Bagian Organisasi adalah merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang kelembagaan dan analisa formasi jabatan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, serta akuntabilitas kinerja.

Fungsi Bagian Organisasi yaitu:

- a. Perumusan bahan kebijakan pemerintahan daerah dibidang kelembagaan dan analisis formasi jabatan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, serta akuntabilitas kinerja;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian tugas bidang organisasi yang meliputi kelembagaan dan analisis formasi jabatan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, serta akuntabilitas kinerja;

- c. Pengaturan program dan kegiatan organisasi yang meliputi kelembagaan dan analisis formasi jabatan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, serta akuntabilitas kinerja;
- d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi kelembagaan dan analisis formasi jabatan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, serta akuntabilitas kinerja;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Bagian Umum dan Protokol

Tugas Bagian Umum dan Protokol adalah merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang umum dan protokol.

Fungsi Bagian Umum dan Protokol yaitu:

- a. Penyusunan bahan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Umum dan Protokol;
- b. Penyelenggaraan dan fasilitasi tugas bidang Umum dan Protokol;
- c. Pengaturan program dan kegiatan Umum dan Protokol;
- d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Umum dan Protokol;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Bagian Tata Usaha

Tugas Bagian Tata Usaha adalah merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan di bidang tata usaha.

Fungsi Bagian Tata Usaha yaitu:

- a. Penyusunan bahan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Tata Usaha;
- b. Penyelenggaraan dan fasilitasi tugas bidang Tata Usaha;
- c. Pengaturan program dan kegiatan Tata Usaha ;
- d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tata Usaha ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.3.3 Sumber Daya Organisasi

Sekretariat Daerah Kota Cimahi memiliki sumber daya aparat/personil sebanyak 224 orang (data per Desember 2020) yang terdiri dari 144 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 80 Tenaga Harian Lepas (THL) dengan potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda.

Berikut rincian jumlah aparatur berdasarkan unit kerja, golongan dan tingkat pendidikan.

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah

No	UNIT KERJA	PNS	THL	Jumlah
1	Sekretaris Daerah	1	-	1
2	Staf Ahli	3	-	3
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	1	-	1
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1	-	1
5	Asisten Administrasi Umum	1	-	1
6	Bagian Pemerintahan	11	-	11
7	Bagian Hukum	13	-	13

8	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat	8	4	12
9	Bagian Adm. Perekonomian	7	-	7
10	Bagian Adm. Pembangunan	8	1	9
11	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	17	-	17
12	Bagian Organisasi	9	-	9
13	Bagian Tata Usaha	33	4	37
14	Bagian Umum dan Protokol	31	71	102
	J U M L A H	144	80	224

Sumber: Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Cimahi, 2020

Tabel 1.2
Komposisi ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
IV	19
III	98
II	25
I	2
JUMLAH	144 orang

Tabel 1.3
Komposisi ASN Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

Golongan	Jumlah	Persen
S3	1	0,69
S2	30	20,83
S1	57	39,58
D4	9	6,25
D3	19	13,19
SMA/SMK	25	17,36
SMP	1	0,69
SD	2	1,39
JUMLAH	144 orang	100

Tabel 1.4
Komposisi THL Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

Golongan	Jumlah	Persen
S1	7	8,75
D4	1	1,25
D3	5	6,25
SMA/SMK	58	72,50
SMP	6	7,50
SD	3	3,75
JUMLAH	80 orang	100

I.4. Keuangan

Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Cimahi pada Tahun Anggaran 2020 berasal dari APBD Kota Cimahi.

Tahun Anggaran 2020 Sekretariat Daerah Kota Cimahi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp49.191.901.271,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp24.754.057.500,- dan belanja langsung sebesar Rp24.437.843.771,- untuk mendukung pelaksanaan 5 program dan 58 kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

I.5. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Sekretariat Daerah dimasa mendatang yang mana apabila tidak diantisipasi dapat menghambat pencapaian target kinerja.

Kendala utama yang muncul dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 adalah rasionalisasi anggaran. Seiring dengan mewabahnya penyakit Corona yang menjadi pandemi di seluruh dunia termasuk juga di Indonesia, akhir Bulan Maret 2020 Pemerintah

menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Hal ini berdampak terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*).

Berdasarkan gambaran pelayanan Sekretariat Daerah Kota Cimahi, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Cimahi, telaah visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah Renstra Kemendagri dan telaah RTRW dan KLHS yang tertuang dalam dokumen reviu Renstra Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022, maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Cimahi dapat dibagi menjadi tiga isu utama, yaitu:

1. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan
 - a. Belum adanya kebijakan terkait urusan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Belum termanfaatkannya secara maksimal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
 - c. Belum optimalnya fasilitasi pelayanan keagamaan.
2. Isu terkait perekonomian dan pengendalian pembangunan
 - a. Belum tercapainya kerjasama dengan lembaga keuangan dalam upaya membantu permodalan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
 - b. Inputing data pada e-reporting yang tidak tepat waktu dan kurang akuntabel sehingga informasi atas progress/kemajuan pelaksanaan kegiatan kurang akurat.

Pengendalian pembangunan bertujuan untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.

3. Isu terkait pelayanan publik

- a. Keterbatasan sumber daya aparatur.
- b. Kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung.

I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian LKIP Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan ringkasan sasaran strategis, indikator sasaran, target indikator, capaian indikator dan efisiensi yang sudah dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Cimahi.

BAB.I Pendahuluan

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, struktur organisasi, tugas dan fungsi, sumber daya organisasi, keuangan dan isu strategis Sekretariat Daerah Kota Cimahi

BAB.II Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini disajikan gambaran singkat rencana strategis, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, Indikator Kinerja Utama, program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Cimahi dalam kaitannya dengan capaian visi misi Wali Kota Cimahi serta perjanjian kinerja.

BAB.III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, faktor pendorong dan faktor penghambat.

BAB.IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum terhadap capaian sasaran strategi Sekretariat Daerah dan langkah-langkah untuk mempertahankan atau perbaikan terhadap capaian.

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Untuk mencapai tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, visi dan misi Wali Kota Cimahi terpilih dijabarkan sebagai berikut:

Visi Wali Kota Cimahi yaitu :

“ Mewujudkan Cimahi Baru maju, Agamis dan Berbudaya”

Penjelasan :

Maju mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan.

Agamis mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Berbudaya mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan.

Misi Wali Kota Cimahi yaitu:

1. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul;

2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis Yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran Yang Pro Publik;
3. Kerakyatan Yang Berorientasi Pada Pengembangan Sektor Jasa Berbasis Teknologi Informasi dan Industri Kecil Menengah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan;
4. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Derajat Kehidupan Masyarakat Yang Berkeadilan; dan
5. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Secara Berkesinambungan Dan Berkelanjutan.

Berdasarkan tugas dan fungsinya maka Sekretariat Daerah mendukung misi yang kedua yaitu:

“Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.”

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Pernyataan tujuan tersebut diterjemahkan ke dalam sasaran yang ingin dicapai dimana sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Sekretariat Daerah Kota Cimahi dalam kegiatan setiap tahun untuk kurun waktu lima tahun.

Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah berdasarkan dokumen Berita Acara Hasil Reviu Renstra dan IKU Sekretariat

Daerah Tahun 2018 Nomor 050/BA-3520/TU dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Tujuan Sekretariat Daerah

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1	2	3
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi

Mengacu pada tujuan, maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Sekretariat Daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUNAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Kota	Nilai	B	BB	B	B	B
		Nilai LPPD	Prestasi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	CC	B	B	B	B
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Rata-rata IKM Kota	Indeks	79	80,75	81,56	82,37	83,20

Penurunan target Nilai LPPD di Tahun 2021 disesuaikan karena adanya perubahan pengelompokan klasifikasi nilai yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri melalui Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Semula skor $3 < \text{Sangat Tinggi} \leq 4$ mendapat prestasi sangat tinggi berubah menjadi skor 3,41 – 4,20 mendapat prestasi tinggi.

Pemerintah Kota Cimahi sesuai hasil EKPPD Tahun 2019 meraih skor 3.4699 dengan prestasi Sangat Tinggi.

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Sekretariat Daerah

Visi : Mewujudkan Cimahi Baru Maju, Agamis dan Berbudaya			
Misi 2 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran yang Pro Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan	1. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
			2. Meningkatkan penataan kewilayahan dan penyelesaian konflik pertanahan
			3. Meningkatkan sosialisasi pemanfaatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum daerah
			4. Meningkatkan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan
			5. Meningkatkan kualitas layanan konsultasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum
			6. Meningkatkan fasilitasi pelayanan keagamaan
			7. Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi kebijakan perekonomian
			8. Meningkatkan pelayanan pengadaan barang dan jasa

			9. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		1. Peningkatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah
			2. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan
			3. Peningkatan kapasitas aparatur penyelenggaraan pemerintah

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama instansi pemerintah yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri PAN RB Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Cimahi seperti yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 060/Kep.1449-Org/2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2019-2022.

Tabel 2.4
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah di Lingkup Sekretariat Daerah	Nilai AKIP Kota
				Nilai LPPD
				Nilai Indeks Reformasi Birokrasi
			2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Rata-rata IKM Kota

Formula dari masing-masing indikator sasaran sebagai berikut:

1. Capaian indikator sasaran nilai AKIP Kota diperoleh berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

No	KOMPONEN	BOBOT
1	Perjanjian Kinerja	30%
2	Pengukuran Kinerja	25%
3	Pelaporan Kinerja	15%
4	Evaluasi Internal	10%
5	Capaian Kinerja	20%
	Total	100%

2. Capaian indikator sasaran nilai LPPD diperoleh berdasarkan hasil nilai evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Penilaian mencakup dua variabel, yaitu Indeks Capaian Kinerja dengan bobot 95% dan Indeks Kesesuaian Materi dengan bobot 5%.

3. Capaian indikator sasaran nilai indeks Reformasi Birokrasi diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi.

KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT
a. KOMPONEN PENGUNGKIT	
1. Manajemen Perubahan	5,00
2. Penataan Peraturan Per-UU	5,00
3. Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00
4. Penataan Tata Laksana	5,00
5. Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00
6. Penguatan Akuntabilitas	6,00
7. Penguatan Pengawasan	12,00
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00
Total Komponen Pengungkit (A)	60,00
I. KOMPONEN HASIL	
1. Nilai AKuntabilitas Kinerja	14,00
2. Survei Internal Integritas Organisasi	6,00
3. Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00
4. Opini BPK	3,00
5. Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00
Total Komponen Hasil (B)	40,00
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100

4. Realisasi indikator Nilai Rata-Rata IKM Kota diperoleh dari Formula indeks pelayanan publik:

$$\frac{\sum \text{skor IKM Unit Pelayanan Publik (UPP)}}{\sum \text{Jumlah Layanan}}$$

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja tetap memperhatikan RPJMD, Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Kota	Nilai B
		Nilai LPPD	Sangat Tinggi
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Nilai B
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Rata-rata IKM Kota	Nilai 80

Program

Anggaran

Rp 36.457.396.468,-

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp 16.762.130.821,-
2. Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen dan Pelayanan Administratif
Rp 18.001.060.147,-
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 400.131.500,-
4. Program Pengelolaan Pertanahan
Rp 521.970.000,-
5. Program Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, Dukungan Manajemen
Rp 772.104.000,-

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris Daerah Tahun 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Kota	Nilai B
		Nilai LPPD	Sangat Tinggi
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	Nilai B
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Rata-rata IKM Kota	Nilai 80

Program	Anggaran
	Rp 24.437.843.771,-
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 15.104.848.319,-
2. Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan, Dukungan Manajemen dan Pelayanan Administratif	Rp 8.975.348.077,-
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 157.648.450,-
4. Program Pengelolaan Pertanahan	Rp 81.732.000,-
5. Program Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, Dukungan Manajemen	Rp 118.266.925,-

2.4 Program, Kegiatan Dan Pendanaan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai (*outcome*) suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan kedalam program, kegiatan dan pendanaan.

Data program, kegiatan dan pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.7 dibawah ini.

Tabel 2.7
Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah
Tahun 2020

No	PROGRAM dan KEGIATAN	PAGU (Rp.)
1	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	15.104.848.319
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	113.789.364
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik Dan Air	1.500.440.000
	Penyediaan Media Massa, Barang Cetak Dan Penggandaan	231.326.000
	Pengadaan Dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	2.365.107.128
	Pengadaan Dan Pemeliharaan Meubeler Kantor	223.000.000
	Pengadaan Dan Pemeliharaan Peralatan Kantor	670.394.302
	Penyediaan Gudang Kantor	150.000.000

No	PROGRAM dan KEGIATAN	PAGU (Rp.)
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	3.039.239.200
	Koordinasi Dan Konsultasi Kedinasan	244.894.448
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.562.382.607
	Pemeliharaan Rumah Dan Gedung Dinas	3.991.050.000
	Fasilitasi Persuratan Pimpinan Daerah	817.759.870
	Penyediaan komponen listrik/penerangan kantor	153.759.400
	Penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan	41.706.000
2	Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan Dukungan Manajemen Dan Pelayanan Administratif	8.975.348.077
	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	102.094.658
	Teknologi Informasi Dan Pelaporan Pengadaan	42.831.728
	Pelayanan Pengadaan	81.562.292
	Perencanaan Dan Pembinaan Pengadaan	44.324.452
	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	68.548.750
	Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah	8.092.988
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban	102.947.983
	Penataan Ketatalaksanaan Dan Pelayanan Publik	208.225.706
	Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesehatan	58.484.277
	Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sosial Kemasyarakatan	44.297.325
	Sinergitas Pelaksanaan Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga	125.286.102

No	PROGRAM dan KEGIATAN	PAGU (Rp.)
	Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	34.954.000
	Penyusunan Analisa Standar Belanja	215.591.649
	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Sarana Dan Prasarana Publik	177.916.225
	Fasilitasi Koordinasi Administrasi Perekonomian	60.148.355
	Fasilitasi Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif	22.435.338
	Pengembangan Kebijakan Dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	27.722.000
	Penataan Kelembagaan	103.840.752
	Peningkatan Pemahaman Dan Pengamalan Agama	99.609.150
	Fasilitasi Kegiatan Bidang Keagamaan	1.607.077.992
	Pelayanan Kegiatan Bidang Keagamaan	715.069.342
	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	48.166.650
	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	61.778.317
	Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya	237.404.156
	Evaluasi Dan Pelaporan	116.331.753
	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	163.172.579
	Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	6.524.055
	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	86.838.000

No	PROGRAM dan KEGIATAN	PAGU (Rp.)
	Dialog/Audiensi Dengan Tokoh Masyarakat	124.551.000
	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	177.304.000
	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	76.750.000
	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya	631.894.153
	Penyediaan Rumah Dinas Kdh Dan Wakdh	708.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik KDH Dan Wa.KDH	762.714.150
	Penyediaan Tenaga Pengemudi Dan Pramubakti KDH Dan Wa.KDH	169.440.700
	Penyediaan Seragam Beserta Perlengkapannya KDH Dan Wa.KDH	433.748.800
	Fasilitasi Kegiatan Harian Dan Hari Besar	1.219.668.700
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	157.648.450
	Penyusunan Laporan Keuangan	131.383.200
	Penyusunan Renstra Dan Renja PD	20.429.250
	Penyusunan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP Dan LPPD PD	5.836.000
4	Program Pengelolaan Pertanahan	81.732.000
	Fasilitasi Konflik-Konflik Pertanahan	34.732.000
	Penataan Batas Wilayah	47.000.000
5	Program Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, Dukungan Manajemen	118.266.925
	Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	108.733.000
	Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan	9.533.925
	J U M L A H	24.437.843.771

Hasil Evaluasi LKIP Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 oleh Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2020 diperoleh nilai sebesar 73,81 dengan kategori Sangat Baik (BB). Hasil Evaluasi dijelaskan dalam Tabel 2.8

Tabel 2.8

Hasil Evaluasi LKIP Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2020

No	Komponen		Nilai Hasil Evaluasi		
			Bobot (%)	Nilai	Persen
1	2		3	4	5
A.	Perencanaan Kinerja		30	24.56	81.86
	1.	Perencanaan Strategis	10	8.31	83.09
	2.	Perencanaan Kinerja Tahunan	20	16.25	81.25
B.	Pengukuran Kinerja		25	15.94	63.75
	1.	Pemenuhan Pengukuran	5	3.44	68.75
	2.	Kualitas Pengukuran	12.5	8.75	70.00
	3.	Implementasi Pengukuran	7.5	3.75	50.00
C.	Pelaporan Kinerja		15	11.14	74.29
	1.	Pemenuhan Pelaporan	3	3.00	100
	2.	Penyajian Informasi Kinerja	7.5	5.44	72.57
	3.	Pemanfaatan Informasi Kinerja	4.5	2.70	60.00
D	Evaluasi Internal		4.5	4.42	44.20
	1.	Pemenuhan Evaluasi	2	1.42	71.00
	2.	Kualitas Evaluasi	5	1.88	37.50
	3.	Pemanfaatan Evaluasi	3	1.13	37.50
E.	Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi		20	17.75	88.75
	1.	Kinerja yang Dilaporkan (output)	7.5	6.50	86.67
	2.	Kinerja Yang Dilaporkan (outcome)	12.5	11.25	90.00

Rekomendasi perbaikan kinerja Sekretariat Daerah adalah:

- a. Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi SETDA Kota Cimahi untuk menyempunakan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- b. Menyempunakan target kinerja dan selaras dengan RPJMD berdasarkan indikator yang SMART dan berdasarkan basis data yang memadai dalam dokumen renstra.
- c. Mempublikasikan dalam *website* dokumen-dokumen renstra dan indikator kinerja utama.
- d. Rencana kinerja tahunan agar dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
- e. Melakukan pemantauan rencana aksi untuk mengendalikan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 dengan realisasinya.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretaris Daerah beserta target dan capaian realisasinya dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Realisasi Sasaran/Indikator Kinerja Utama Sekretaris Daerah
Tahun 2020

	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
			2019		2020	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(7)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai AKIP Kota	BB	B Nilai 63,99	B	B
		Nilai LPPD	ST	ST skor 3,3274	ST	ST skor 3,4699
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	CC
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Rata-rata IKM Kota	80	80,75 48 UPP	81,56	81,57 42 UPP

Dari tabel diatas dapat dilihat terdapat 2 sasaran dengan 4 indikator. Pada Tahun 2020, 3 indikator sudah memenuhi target dan 1 indikator belum dapat memenuhi target yang ditetapkan.

3.2 Evaluasi Dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis

3.2.1 Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

1. Indikator Nilai AKIP Kota

Realisasi indikator Nilai AKIP Kota Tahun 2020 diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Tahun 2019. Berdasarkan data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 mendapat nilai 63,99 dengan predikat B dan di Tahun 2019 memperoleh nilai 66 dengan predikat B. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan akuntabilitas kinerja meskipun masih dengan predikat yang sama.

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi menunjukkan hasil yang baik.

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator Nilai AKIP Kota telah tercapai dengan capaian sebesar 100%.

2. Indikator Nilai LPPD

Realisasi indikator Nilai EKPPD Kota Tahun 2020 diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam

Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Cimahi Tahun 2018 yang di evaluasi di Tahun 2019. Metode evaluasi terhadap LPPD dilakukan dengan menilai dua variabel, yaitu:

1. Indeks Capaian Kinerja (ICK) dengan bobot 95%
2. Indeks Kesesuaian Materi (IKM) dengan bobot 5%.

Variabel ICK terdiri dari penilaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan (Kepala Daerah dan DPRD) dan pelaksana kebijakan (Perangkat Daerah). Variabel IKM terdiri dari urusan desentralisasi, tugas pembantuan, tugas umum pemerintahan, gambaran umum daerah, kelengkapan komponen RPJMD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, dan penyajian Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Pengelompokan prestasi capaian kinerja:

- Skor $3 < ST \leq 4$ artinya berprestasi Sangat Tinggi (ST)
- Skor $2 < T \leq 3$ artinya berprestasi Tinggi (T)
- Skor $1 < S \leq 2$ artinya berprestasi Sedang (S)
- Skor $0 \leq R \leq 1$ artinya berprestasi Rendah (R).

Hasil evaluasi atas nilai LPPD Kota Cimahi dari Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.2

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Indikator Nilai EKPPD dengan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi		
			2018	2019	2020
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai LPPD	Sangat Tinggi 3,3590*	Sangat Tinggi 3,3274	Sangat Tinggi 3,4699

** Keputusan Menteri Dalam Negeri No.100-53 Tahun 2018*

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator nilai LPPD telah tercapai dengan capaian sebesar 100%.

3. Indikator Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

Realisasi indikator Nilai Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi.

Berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas Nilai indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2018, Kota Cimahi mendapat nilai 52,09 dengan predikat CC, dan pada tahun 2019 nilai indeks reformasi birokrasi yang diperoleh adalah nilai 60,01 dengan predikat B. Pada Tahun 2020 nilai hasil evaluasi belum di rilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3.2.2 Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

1. Nilai Rata-rata IKM Kota

Formula indeks pelayanan publik:

$$\frac{\sum \text{skor IKM Unit Pelayanan Publik (UPP)}}{\sum \text{Jumlah Layanan}}$$

Kategorisasi mutu pelayanan pada Unit Pelayanan Publik mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Rekapitulasi hasil survey kepuasan masyarakat terhadap Unit Pelayanan Publik di Kota Cimahi Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik
Kota Cimahi Tahun 2020

No.	UPP	HASIL PENGUKURAN IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA
1.	DINAS PENDIDIKAN	80,98	B	Baik
2.	DINSOSP2KBP3A	81,57	B	Baik
3.	DINAS TENAGA KERJA	86,27	B	Baik
4.	DINAS KESEHATAN	70,04	C	Kurang Baik
5.	DPMPTSP	82,99	B	Baik
6.	BAPPEDA	78,07	B	Baik
7.	BAPPENDA	82,1	B	Baik
8.	BKPSDMD	79,50	B	Baik
9.	BPKAD	80,10	B	Baik
10.	RSUD CIBABAT	77,45	B	Baik
11.	KANTOR KESATUAN BANGSA	84,86	B	Baik
12.	KEC. CIMAHI UTARA	90,58	A	Sangat Baik
13.	KEC. CIMAHI TENGAH	91,94	A	Sangat Baik

14.	KEC. CIMAHI SELATAN	84,98	B	Baik
15.	KEL. CIPAGERAN	77,34	B	Baik
16.	KEL. PASIRKALIKI	97,69	A	Sangat Baik
17.	KEL. CIBABAT	85,88	B	Baik
18.	KEL. BAROS	84,25	A	Sangat Baik
19.	KEL. CITEUREUP	79,38	B	Baik
20.	KEL. KARANGMEKAR	82,94	B	Baik
21.	KEL. CIBEUREUM	84,15	A	Sangat Baik
22.	UPTD PUSKESMAS CIPAGERAN	78,20	B	Baik
23.	UPTD PUSKESMAS CIMAHI UTARA	80,36	B	Baik
24.	UPTD PUSKESMAS CITEUREUP	78,20	B	Baik
25.	UPTD PUSKESMAS PASIRKALIKI	79,69	B	Baik
26.	UPTD PUSKESMAS PADASUKA	81,09	B	Baik
27.	UPTD PUSKESMAS CIBEUREUM	78,49	B	Baik
28.	UPTD PUSKESMAS MELONG ASIH	78,99	B	Baik
29.	UPTD METEOROLOGI LEGAL	83,50	B	Baik
30.	UPTD CIMAHI TECHNOPARK	82,50	B	Baik
31.	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN	77,38	B	Baik
32.	UPTD PASAR KOTA	82,50	B	Baik
33.	UPTD PUSKESWAN	81,47	B	Baik
34.	UPTD BALAI BENIH IKAN TAWAR	80,43	B	Baik
35.	UPTD RUSUNAWA	79,17	B	Baik
36.	UPTD AIR MINUM	77,60	B	Baik
37.	BAGIAN TATA USAHA SETDA	79,75	B	Baik
38.	BAGIAN ORGANISASI SETDA	82,62	B	Baik
39.	BAGIAN ADMINISTRASI KESRA SETDA	83,62	B	Baik
40.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA	79,52	B	Baik

Tabel 3.3
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik
Kota Cimahi Tahun 2020

No.	UPP	HASIL PENGUKURAN IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA
1.	DINAS PENDIDIKAN	80,98	B	Baik
2.	DINSOSP2KBP3A	81,57	B	Baik
3.	DINAS TENAGA KERJA	86,27	B	Baik
4.	DINAS KESEHATAN	70,04	C	Kurang Baik
5.	DPMPTSP	82,99	B	Baik
6.	BAPPEDA	78,07	B	Baik
7.	BAPPENDA	82,1	B	Baik
8.	BKPSDMD	79,50	B	Baik
9.	BPKAD	80,10	B	Baik
10.	RSUD CIBABAT	77,45	B	Baik
11.	KANTOR KESATUAN BANGSA	84,86	B	Baik
12.	KEC. CIMAHI UTARA	90,58	A	Sangat Baik
13.	KEC. CIMAHI TENGAH	91,94	A	Sangat Baik
14.	KEC. CIMAHI SELATAN	84,98	B	Baik
15.	KEL. CIPAGERAN	77,34	B	Baik
16.	KEL. PASIRKALIKI	97,69	A	Sangat Baik
17.	KEL. CIBABAT	85,88	B	Baik
18.	KEL. BAROS	84,25	A	Sangat Baik
19.	KEL. CITEUREUP	79,38	B	Baik
20.	KEL. KARANGMEKAR	82,94	B	Baik
21.	KEL. CIBEUREUM	84,15	A	Sangat Baik
22.	UPTD PUSKESMAS CIPAGERAN	78,20	B	Baik
23.	UPTD PUSKESMAS CIMAHI UTARA	80,36	B	Baik
24.	UPTD PUSKESMAS CITEUREUP	78,20	B	Baik
25.	UPTD PUSKESMAS PASIRKALIKI	79,69	B	Baik

26.	UPTD PUSKESMAS PADASUKA	81,09	B	Baik
27.	UPTD PUSKESMAS CIBEUREUM	78,49	B	Baik
28.	UPTD PUSKESMAS MELONG ASIH	78,99	B	Baik
29.	UPTD METEOROLOGI LEGAL	83,50	B	Baik
30.	UPTD CIMAHI TECHNOPARK	82,50	B	Baik
31.	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN	77,38	B	Baik
32.	UPTD PASAR KOTA	82,50	B	Baik
33.	UPTD PUSKESWAN	81,47	B	Baik
34.	UPTD BALAI BENIH IKAN TAWAR	80,43	B	Baik
35.	UPTD RUSUNAWA	79,17	B	Baik
36.	UPTD AIR MINUM	77,60	B	Baik
37.	BAGIAN TATA USAHA SETDA	79,75	B	Baik
38.	BAGIAN ORGANISASI SETDA	82,62	B	Baik
39.	BAGIAN ADMINISTRASI KESRA SETDA	83,62	B	Baik
40.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA	79,52	B	Baik
41.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA	79,04	B	Baik
42.	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SETDA	83,77	B	Baik
	NILAI IKM	81,57	B	BAIK

Indikator Nilai Rata-rata IKM Kota Tahun 2020 meningkat 0,98% dibandingkan Tahun 2019. Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa lebih puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Perbandingan Nilai Rata-rata IKM Kota Cimahi dari tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini.

41.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA	79,04	B	Baik
42.	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SETDA	83,77	B	Baik
	NILAI IKM	81,57	B	BAIK

Indikator Nilai Rata-rata IKM Kota Tahun 2020 meningkat 0,98% dibandingkan Tahun 2019. Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa lebih puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Perbandingan Nilai Rata-rata IKM Kota Cimahi dari tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Indikator Nilai Rata-rata IKM Kota dengan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi		
			2018	2019	2020
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Rata-rata IKM Kota	Baik 80,95	Baik 80,75	Baik 81,57

Sumber data: Laporan Capaian IKM Kota Cimahi, Bagian Organisasi Setda

3.3 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA

Analisis dilakukan terhadap indikator sasaran Sekretaris Daerah Kota Cimahi sesuai yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris Daerah Kota Cimahi Tahun 2020.

3.3.1 Indikator Nilai AKIP Kota

Dilihat dari capaian predikat, realisasi sudah sesuai dengan target yaitu B. Namun jika dilihat dari nilai yang

diperoleh, masih terdapat beberapa hal yang perlu untuk diperbaiki dalam upaya peningkatan nilai hasil evaluasi, diantaranya:

1. Perumusan Sasaran Strategis pada RPJMD maupun Renstra belum sepenuhnya mampu menggambarkan kinerja *outcome* yang diharapkan akan dicapai;
2. Masih terdapat rumusan indikator kinerja yang tidak relevan mengukur keberhasilan sasaran pembangunan baik pada level Pemerintah Kota maupun Perangkat Daerah;
3. Mekanisme *cascade* kinerja tidak berpedoman pada proses bisnis organisasi dimana penyusunan IKU tidak memperhatikan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan RPJMD maupun RKP serta tugas fungsi dan peran yang diemban oleh setiap jabatan;
4. Masih terdapat ketidaksesuaian antara indikator kinerja individu dengan ukuran kinerja yang dituangkan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
5. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan masih memantau pencapaian *output* dan penyerapan anggaran;
6. Pemanfaatan aplikasi monitoring kinerja tidak berjalan optimal. Informasi kinerja yang dihasilkan dari mekanisme monitoring kinerja tidak efektif memicu berbagai perbaikan yang diperlukan.

Usaha yang dilakukan untuk mencapai target diantaranya:

1. Melakukan reviu secara ringkas terhadap RPJMD dan Renstra Sekretariat Daerah Kota Cimahi untuk lebih memastikan seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja telah berorientasi pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan masyarakat, memperhatikan keterpaduan perencanaan serta telah melakukan *cascade* kinerja;

2. *Cascade* kinerja dibangun berdasarkan proses bisnis dalam rangka mencapai berbagai kinerja yang telah dituangkan dalam RPJMD sehingga penyusunan IKU akan mengacu kepada *cascade* kinerja tersebut;
3. Melakukan integrasi sistem perencanaan kinerja, sistem penganggaran dan informasi kinerja, untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
4. Membangun sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja untuk memastikan validitas capaian kinerja;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi bukan hanya pada pencapaian output kegiatan dan penyerapan anggaran namun juga evaluasi program untuk memastikan bahwa program kegiatan merupakan cara yang paling efektif dan efisien sebagai upaya pencapaian sasaran strategis maupun sasaran pembangunan kota;
6. Mendorong penyusunan indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP.

3.3.2 Indikator Nilai LPPD Kota

Berdasarkan hasil evaluasi penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Cimahi Tahun 2018 yang dilaksanakan di Tahun 2019 diperoleh skor EKPPD adalah 3,4699. Berdasarkan pengelompokan prestasi capaian kinerja, maka dengan hasil indeks tersebut Pemerintah Daerah Kota Cimahi masuk kategori berprestasi Sangat Tinggi (skala 3-4).

Usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan penyusun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah se-Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
2. Melaksanakan *desk* pencermatan IKK;
3. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis pendampingan penyusunan IKK dengan mengundang nara sumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Provinsi Jawa Barat.

3.3.3 Indikator Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

Realisasi masih dibawah target dikarenakan beberapa hal berikut:

1. Pemerintah Daerah Kota Cimahi belum mampu mengidentifikasi indikator dan target keberhasilan dari setiap area perubahan sehingga percepatan reformasi birokrasi belum optimal;
2. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) belum dilakukan secara optimal untuk menilai perkembangan reformasi birokrasi di Kota Cimahi;
3. Pembentukan struktur organisasi yang berjalan saat ini, belum sepenuhnya mempertimbangkan proses bisnis dan kinerja yang akan diwujudkan;
4. Pengelolaan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) belum sepenuhnya didasarkan pada kinerja yang ingin diwujudkan. Penetapan standar kompetensi SDM yang berbasis kinerja dan pengisian jabatan oleh aparatur yang memenuhi standar kompetensi sangat diperlukan untuk mewujudkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Usaha yang dilakukan untuk mencapai target diantaranya:

1. Menetapkan indikator dan target keberhasilan masing-masing area perubahan sehingga hasil yang akan dicapai dapat diukur manfaatnya bagi masyarakat Kota Cimahi;

2. Meningkatkan implementasi PMPRB dengan mengadakan pertemuan secara berkala dengan para pokja untuk dapat memantau dengan baik perkembangan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
3. Melakukan evaluasi kelembagaan yang didasarkan pada kinerja yang akan diwujudkan dalam proses bisnis;
4. Mereviu standar kompetensi pegawai yang didasarkan pada kebutuhan struktur organisasi.
5. Menetapkan kebijakan studi tiru pada unit kerja yang telah ditetapkan sebagai unit kerja percontohan zona integritas;
6. Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan peraturan perundangan untuk memastikan bahwa aturan yang ditetapkan dilaksanakan sesuai dengan alasan ditetapkannya peraturan tersebut;
7. Mengintegrasikan semua pelaksanaan reformasi birokrasi dengan kinerja yang akan dicapai sehingga pelaksanaan RB lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh *stakeholder*;
8. Meningkatkan komunikasi dengan *stakeholder* terutama dalam rangka menginformasikan segala perbaikan/inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

3.3.4 Indikator Nilai Rata-Rata IKM Kota

Indeks ini diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Target indikator ini pada tahun 2020 adalah 81,56 tercapai 81,75. Capaian indeks tersebut menunjukkan kinerja pelayanan masuk kategori baik.

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya dukungan sarana dan prasarana pelayanan publik;
- 2) Komitmen dari pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang prima; dan

3) Pagu anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

Faktor penghambat dalam pencapaian target indeks pelayanan publik diantaranya adalah regulasi di pemerintah pusat yang berkaitan dengan survei kepuasan masyarakat sering berubah-ubah sehingga menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian di tingkat pemerintah kota.

3.4 ANALISIS ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

3.4.1 Anggaran

Untuk mencapai target empat indikator sasaran yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah Kota Cimahi mengalokasikan belanja langsung Tahun 2020 sebesar Rp24.437.843.771,-. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp21.690.030.682,- atau 88,75%. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Kota Cimahi telah melakukan efisiensi anggaran sebesar sebesar Rp22.747.813.089,- atau 11,25%.

3.4.2 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per Desember Tahun 2020 jumlah personil di Sekretariat Daerah Kota Cimahi sebanyak 224 orang, dengan rincian 144 orang ASN dan 80 orang THL. Jumlah ini masih kurang karena belum memenuhi analisis jabatan pada masing-masing Bagian/Unit Kerja di lingkup Sekretariat Daerah Kota Cimahi. Langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Cimahi.

3.5 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Berikut ini disajikan perbandingan realisasi kinerja Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 dan 2020

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 dan 2020

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output))	Target Kinerja RPJMD Setda Kota Cimahi Tahun Ke		Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke		Unit Penanggung Jawab	Keterangan
				2019	2020	2019	2020		
1	MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	FASILITASI RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)	Jumlah dokumen laporan RANHAM, Jumlah dokumen penilaian Kota Peduli HAM, Jumlah rakor sosialisasi RANHAM (kali)	6	4	5	4	Bag. Hukum	Perlambatan
		FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah penyuluhan hukum	17		17		Bag. Hukum	Tidak dapat dibandingkan karena perbedaan indikator
			Jumlah Peserta		300		300		
		KAJIAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DAERAH	Jumlah kajian	3	1	3	1	Bag. Hukum	perlambatan
		LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	- Jumlah keputusan dan workshop - Jumlah Peraturan Walikota - Jumlah Raperda	1573	1540	2,610	2592	Bag. Hukum	Percepatan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output))	Target Kinerja RPJMD Setda Kota Cimahi Tahun Ke		Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke		Unit Penanggung Jawab	Keterangan
				2019	2020	2019	2020		
		PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA	- Jumlah bantuan hukum bagi masyarakat, - Jumlah legal memorandum, - Jumlah pembahasan permasalahan hukum , - Jumlah penanganan permasalahan hukum (kasus), - Jumlah pendampingan saksi	44	36	36	72	Bag. Hukum	Percepatan
		PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	- Jumlah sosialisasi hukum, - Jumlah cetak bahan publikasi perundang-undangan, - Jumlah cetak bahan publikasi perundang-undangan), - Jumlah cetak buku perda, - Jumlah cetak ulang buku perda, - Jumlah himpunan produk hukum daerah, - Jumlah website yang dipelihara	10	18	5	18	Bag. Hukum	Percepatan
		PELAYANAN PENGADAAN	Jumlah bulan	12		12		Bag. PBJ	Tidak dapat dibandingkan karena perbedaan indikator
			Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang difasilitasi		100		100		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output))	Target Kinerja RPJMD Setda Kota Cimahi Tahun Ke		Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke		Unit Penanggung Jawab	Keterangan
				2019	2020	2019	2020		
	PERENCANAAN DAN PEMBINAAN PENGADAAN		Jumlah bulan	12		12		Bag. PBJ	Tidak dapat dibandingkan karena perbedaan indikator
			Jumlah Kegiatan Rakor/ Sosialisasi, Bintek, Ujian Sertifikasi		3		3		
			Jumlah bulan	12		12			
	TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN PENGADAAN		Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang terfasilitasi oleh sistem teknologi informasi pengadaan barang/jasa		100		100	Bag. PBJ	Tidak dapat dibandingkan karena perbedaan indikator
			Jumlah dialog	78	39	78	39		
	DIALOG / AUDIENSI DENGAN TOKOH MASYARAKAT		Jumlah Kegiatan yang difasilitasi	134	80	134	80	Bag. Umprot	perlambatan
	FASILITASI KEGIATAN HARIAN DAN HARI BESAR		Jumlah kegiatan	165	50	165	50	Bag. Umprot	perlambatan
	KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA		Jumlah inspeksi	48	24	48	24	Bag. Umprot	perlambatan
	KUNJUNGAN KERJA /INSPEKSI KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH								

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output))	Target Kinerja RPJMD Setda Kota Cimahi Tahun Ke		Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke		Unit Penanggung Jawab	Keterangan
				2019	2020	2019	2020		
		PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA/DEPARTEMEN/LEM BAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN/LUAR NEGERI	Jumlah kunjungan	25	15	25	15	Bag. Umprot	perlambatan
		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KDH DAN WAKDH	Jumlah bulan penyediaan logistik	12	12	12	12	Bag. Umprot	tetap
		PENYEDIAAN TENAGA PENGEMUDI DAN PRAMUBAKTI KDH DAN WAKDH	Jumlah THL pengemudi dan pramubakti Jumlah Bulan Penyediaan THL pengemudi dan pramubakti		12	10	12	Bag. Umprot	Tidak dapat dibandingkan karena perbedaan indikator
		RAPAT KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Rapat Koordinasi	48	2	24	2	Bag. Umprot	perlambatan
		PENYUSUNAN ANALISA STANDAR BELANJA	Jumlah dokumen standar belanja/ e reporting (analisa standar belanja+ standar biaya belanja+tunjangan kinerja)	3	3	3	3	Bag. Adbang	Tetap

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output))	Target Kinerja RPJMD Setda Kota Cimahi Tahun Ke		Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke		Unit Penanggung Jawab	Keterangan
				2019	2020	2019	2020		
		EVALUASI DAN PELAPORAN	Jumlah bulan	12	12	12	12	Bag. Adbang	Tetap
		FASILITASI KOORDINASI ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	a. Jumlah Rekomendasi b. Dokumen Kebijakan c. Pengendalian Inflasi Daerah d. Jumlah monitoring BUMD e. Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Program CSR/TJSL	77		60		Bag. Admirek	Tetap
		FASILITASI KEBIJAKAN PANGAN 2018: MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN PERBERASAN , sasaran: MENURUNNYA KEMISKINAN	Jumlah Monev Penyaluran Pangan Pusat dan Daerah			11		Bag. Admirek	Tahun 2020 kegiatan dialihkan ke DinsosP2KBP 3A
		FASILITASI KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Kebijakan/ jumlah saran/ rekomendasi	3	1		1	Bag. Admirek	perlambatan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output))	Target Kinerja RPJMD Setda Kota Cimahi Tahun Ke		Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke		Unit Penanggung Jawab	Keterangan
				2019	2020	2019	2020		
		PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI LOKAL	Jumlah Lembaga Keuangan Yang Melaksanakan MOU	-	1	0	0	Bag. Admirek	perlambatan
		FASILITASI / PEMBENTUKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PUBLIK	Jumlah Nota Kesepahaman / Perjanjian Kerjasama / NHPD yang dibahas di forum TKKSD	467	425	775	440	Bag. Pemerintahan	perlambatan
		PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	jumlah koordinasi yang difasilitasi	10	6	10	6	Bag. Pemerintahan	perlambatan
		KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN	Jumlah dokumen	3	4	3	4	Bag. Pemerintahan	percepatan
		FASILITASI KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	jumlah sengketa tanah yang diselesaikan	4	2	4	2	Bag. Pemerintahan	perlambatan
		PENATAAN BATAS WILAYAH	jumlah dokumen penegasan batas wilayah	3	1	1	1	Bag. Pemerintahan	tetap
		FASILITASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah lokasi yang ditangani BBGRM dan BSMSS	2	2	2	2	Bag. Pemerintahan	Tetap

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output))	Target Kinerja RPJMD Setda Kota Cimahi Tahun Ke		Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke		Unit Penanggung Jawab	Keterangan
				2019	2020	2019	2020		
		PEMBINAAN ADMINISTRASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN	jumlah kegiatan pembinaan administrasi lembaga kemasyarakatan	-	2	4	2	Bag. Pemerintahan	Tetap
		AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	- Jumlah Dokumen AKIP - Jumlah Kegiatan Reformasi Birokrasi yang Difasilitasi - Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan - Tersedianya aplikasi Siakip		10	9	10	Bag. Org	percepatan
		PENATAAN KELEMBAGAAN	- Jumlah Dokumen Kajian Kelembagaan - Jumlah Dokumen Analisis Jabatan - Fasilitas Kegiatan Forsesdasi		3	3	3	Bag. Org	tetap
		PENATAAN KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK	- Jumlah Dokumen SOP - Jumlah Dokumen Standar Pelayanan - Jumlah Dokumen IKM Perangkat Daerah		7	3	7	Bag. Org	Percepatan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output))	Target Kinerja RPJMD Setda Kota Cimahi Tahun Ke		Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke		Unit Penanggung Jawab	Keterangan
				2019	2020	2019	2020		
		PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	jumlah pegawai/ jumlah kegiatan	-		183		Bag. TU	Tahun 2020 kegiatan tidak dilaksanakan
		PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	Jumlah dokumen		16	9	16	Bag. TU	percepatan
		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Setda		2	2	2	Bag. TU	tetap
		PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	Jumlah dokumen	8	12	13	12	Bag. TU	tetap
		FASILITASI PERSURATAN PIMPINAN DAERAH	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	32.000	29.000	30.720	24.599	Bag. TU	perlambatan
		KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	Jumlah Perjalanan Dinas yang difasilitasi		100	447	100	Bag. TU	perlambatan
		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Bulan	12	7	12	7	Bag. TU	perlambatan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output))	Target Kinerja RPJMD Setda Kota Cimahi Tahun Ke		Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke		Unit Penanggung Jawab	Keterangan
				2019	2020	2019	2020		
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	Jumlah bulan	12	12	12	12	Bag. TU	Tetap
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Jumlah bulan	12	12	12	12	Bag. Umprot	Tetap
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN MEUBELEUR KANTOR	Jumlah paket	1	1	-	1	Bag. Umprot	tetap
		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	Jumlah paket	4	7	10	7	Bag. Umprot	perlambatan
		PENGADAAN SERAGAM PEGAWAI	Jumlah set seragam pegawai	144		-		Bag. Umprot	Tidak dilaksanakan di Tahun 2020
		PENYEDIAAN SERAGAM BESERTA PERLENGKAPANNYA KADH DAN WA.KDH	Jumlah set seragam pegawai		31	22	31	Bag. Umprot	Percepatan
		PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	Jumlah paket	2	1	2	1	Bag. Umprot	perlambatan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output))	Target Kinerja RPJMD Setda Kota Cimahi Tahun Ke		Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke		Unit Penanggung Jawab	Keterangan
				2019	2020	2019	2020		
		PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	Jumlah unit	3	3	3	3	Bag. Umprot	tetap
		PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	jumlah orang	42	38	31	38	Bag. Umprot	perlambatan
		PENYEDIAAN KOMPONEN LISTRIK/PENERANGAN KANTOR	Jumlah Paket	2	1	2	1	Bag. Umprot	perlambatan
		PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Jumlah kegiatan yang difasilitasi	128	128	160	128	Bag. Umprot	perlambatan
		PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGGANDAAN	Jumlah paket	4	2	3	2	Bag. Umprot	perlambatan
		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah kegiatan yang difasilitasi/ jumlah set	1				Bag. Umprot	Kegiatan tidak berlanjut di Tahun 2019
		PEMELIHARAAN RUMAH DAN GEDUNG DINAS	Jumlah paket		7	9	7	Bag. Umprot	perlambatan
		PENYEDIAAN RUMAH DINAS KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Jumlah Unit Rumah Dinas		2	2	1	Bag. Umprot	perlambatan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output))	Target Kinerja RPJMD Setda Kota Cimahi Tahun Ke		Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke		Unit Penanggung Jawab	Keterangan
				2019	2020	2019	2020		
2	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	FASILITASI KEGIATAN BIDANG KEAGAMAAN	Jumlah fasilitas kegiatan bidang keagamaan	6	30	30	29	Bag. Kesra	tetap
		PELAYANAN KEGIATAN BIDANG KEAGAMAAN.	Jumlah layanan kegiatan keagamaan	96	20	20	15	Bag. Kesra	perlambatan
		PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AGAMA	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan keagamaan	2.976	1060	5.980	60	Bag. Kesra	perlambatan
		SINERGITAS PELAKSANAAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA.	Jumlah kegiatan yang tersinergikan di bidang kepemudaan dan olahraga	19	7	16	6	Bag. Kesra	perlambatan
		SINERGITAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN	Jumlah kegiatan yang tersinergikan di bidang kesehatan		4	36	3	Bag. Kesra	perlambatan
		SINERGITAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Jumlah kegiatan yang tersinergikan di bidang pengendalian penduduk, KB, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	7	2	8	2	Bag. Kesra	perlambatan
		SINERGITAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN.	Jumlah kegiatan yang tersinergikan di bidang sosial kemasyarakatan	15	5	14	1	Bag. Kesra	perlambatan

Dari tabel perbandingan realisasi kinerja Sekretariat Daerah Kota Cimahi dibandingkan dengan target RPJMD Kota Cimahi di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan yang mengalami percepatan (capaian kinerja Tahun 2020 lebih besar dari capaian kinerja Tahun 2019), antara lain disebabkan oleh faktor dari luar kewenangan penanggung jawab kegiatan. Misalnya kegiatan Legislasi Rancangan Perundang-Undangan di Bagian Hukum, disebabkan karena Tahun 2020 ada penambahan target Surat Keputusan (SK) yang difasilitasi. Penambahan target jumlah SK yang difasilitasi tersebut tidak hanya berasal dari lingkup Sekretariat Daerah saja namun juga berasal dari perangkat daerah di luar Sekretariat Daerah. Faktor lain yang menyebabkan tingginya realisasi dari target adalah, sejak Tahun 2019, penetapan SK *By Name By Address*, sehingga meskipun SK yang diajukan untuk difasilitasi memiliki kesamaan nomenklatur dan substansi, namun tetap harus dipisahkan penyusunannya berdasarkan nama.

Contoh lainnya di Bagian Hukum adalah Kegiatan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Di Bawahnya. Jumlah kasus yang ditangani pada Tahun 2020 memang lebih besar dari Tahun 2019, artinya dapat dikategorikan sebagai percepatan. Namun, percepatan itu lebih disebabkan oleh jumlah kasus hukum yang memang tidak bisa diprediksi.

2. Kegiatan yang mengalami perlambatan (capaian kinerja Tahun 2020 lebih kecil dari capaian kinerja tahun sebelumnya). Contohnya kegiatan Dialog/Audiensi Dengan Tokoh Masyarakat yang capaian kinerja Tahun 2020 sebanyak 18 kegiatan menurun dari capaian kinerja Tahun 2019 sebanyak 78,00, Kegiatan-kegiatan yang mengalami penurunan lebih disebabkan karena rasionalisasi anggaran untuk *refocusing* penanganan pandemi covid-19.

3. Kegiatan yang kinerjanya tetap lebih disebabkan karena sifat kegiatannya yang bersifat rutin sehingga tidak ada fluktuasi perubahan target kinerja dari tahun ke tahun.
4. Di luar kategori di atas, terdapat beberapa kegiatan yang tidak bisa dibandingkan karena terdapat perbedaan indikator antara Tahun 2019 dan Tahun 2020. Contohnya antara lain:
 - a. Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Perundang-Undangan di Bagian Hukum, yang pada tahun 2019 indikator kinerjanya jumlah penyuluhan hukum menjadi jumlah peserta penyuluhan hukum;
 - b. Kegiatan Pelayanan Pengadaan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Pada Tahun 2019 indikator kinerjanya jumlah bulan menjadi Persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
 - c. Kegiatan Perencanaan dan Pembinaan Pengadaan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Pada Tahun 2019 indikator kinerjanya jumlah bulan menjadi Jumlah Kegiatan Rakor/ Sosialisasi.
 - d. Kegiatan Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadaan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Pada Tahun 2019 indikator kinerjanya jumlah bulan menjadi Persentase pelaksanaan barang/jasa yang terfasilitasi oleh system teknologi informasi pengadaan barang/jasa.
 - e. Kegiatan Penyediaan Tenaga Pengemudi dan Pramubakti pada Bagian Umum dan Protokol. Pada Tahun 2019 indikator kinerjanya jumlah THL pengemudi dan pramubakti KDH dan Wa.KDH menjadi jumlah THL pengemudi dan pramubakti.
5. Kegiatan lainnya tidak dapat dibandingkan karena sifat kegiatannya tidak berkelanjutan terhenti di Tahun 2019.

3.6 REALISASI ANGGARAN

Anggaran Belanja Langsung Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 sebesar Rp32.620.147.406,- dengan rincian realisasi per kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Sekretariat Daerah
Tahun 2020

No	PROGRAM dan KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.104.848.319	13.970.160.404	90.51
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	113.789.364	113.789.050	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik Dan Air	1.500.440.000	1.237.381.425	82
	Penyediaan Media Massa, Barang Cetakan Dan Penggandaan	231.326.000	226.928.100	98
	Pengadaan Dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	2.365.107.128	2.001.680.247	85
	Pengadaan dan Pemeliharaan Mebeleur	223.000.000	207.553.120	93
	Pengadaan Dan Pemeliharaan Peralatan Kantor	670.394.302	623.473.302	93
	Penyediaan Gudang Kantor	150.000.000	145.000.000	97
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	3.039.239.200	2.884.931.512	95
	Koordinasi Dan Konsultasi Kedinasan	244.894.448	191.336.730	78
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.562.382.607	1.487.521.798	95
	Pemeliharaan Rumah Dan Gedung Dinas	3.991.050.000	3.907.004.006	98

No	PROGRAM dan KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	Fasilitasi Persuratan Pimpinan Daerah	817.759.870	766.781.852	94
	Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Kantor	153.759.400	136.676.456	89
	Penyediaan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan	41.706.000	39.319.000	94
2	Program Kebijakan Daerah, Koordinasi, Pembinaan Dukungan Manajemen Dan Pelayanan Administratif	8.975.348.077	14.404.808.535	93.43
	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	102.094.658	98.048.958	96
	Teknologi Informasi Dan Pelaporan Pengadaan	42.831.728	37.442.500	87
	Pelayanan Pengadaan	81.562.292	81.093.631	99
	Perencanaan Dan Pembinaan Pengadaan	44.324.452	44.179.200	100
	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	68.548.750	62.79.000	92
	Kajian Peraturan Perundang- Undangan Daerah	8.092.988	7.536.000	93
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban	102.947.983	193.804.206	93
	Penataan Ketatalaksanaan Dan Pelayanan Publik	208.225.706	99.603.148	97
	Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesehatan	58.484.277	45.258.781	77
	Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sosial Kemasyarakatan	44.297.325	19.244.000	43
	Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	34.954.000	34.854.000	100

No	PROGRAM dan KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	Sinergitas Pelaksanaan Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga	125.286.102	112.470.531	90
	Penyusunan Analisa Standar Belanja	215.591.649	211.226.672	97
	Fasilitasi /Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Sarana Dan Prasarana Publik	177.916.225	177.726.225	100
	Fasilitasi Koordinasi Administrasi Perekonomian	60.148.355	53.440.000	89
	Fasilitasi Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif	22.435.338	21.192.500	94
	Pengembangan Kebijakan Dan Program Peningkatan Ekonomi LoKal	27.722.000	24.448.000	88
	Penataan Kelembagaan	103.840.752	92.864.702	89
	Peningkatan Pemahaman Dan Pengamalan Agama	99.609.150	10.725.000	11
	Fasilitasi Kegiatan Bidang Keagamaan	1.607.077.992	1.186.097.025	74
	Pelayanan Kegiatan Bidang Keagamaan	715.069.342	424.825.562	59
	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	48.166.650	48.061.000	100
	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	61.778.317	60.783.000	98
	Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya	237.404.156	226.440.975	95
	Evaluasi Dan Pelaporan	116.331.753	111.905.510	96
	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	163.172.579	162.105.779	99
	Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	6.524.055	6.084.200	93

No	PROGRAM dan KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	Dialog/Audiensi Dengan Tokoh Masyarakat	124.551.000	119.900.000	96
	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri	177.304.000	152.573.243	86
	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	76.750.000	68.890.000	90
	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	86.838.000	66.398.000	76
	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya	631.894.153	549.097.208	87
	Penyediaan Rumah Dinas Kdh Dan Wakdh	708.000.000	330.000.000	47
	Penyediaan Bahan Logistik KDH Dan Wa.KDH	762.714.150	737.306.403	97
	Penyediaan Tenaga Pengemudi Dan Pramubakti KDH Dan Wa.KDH	433.748.800	401.301.974	93
	Penyediaan Seragam Beserta Perlengkapannya KDH Dan Wa.KDH	169.440.700	162.310.000	96
	Fasilitasi Kegiatan Harian Dan Hari Besar	1.219.668.700	1.137.602.049	93
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		280.707.900	72.85
	Penyusunan Laporan Keuangan	131.383.200	124.086.852	94
	Penyusunan Renstra Dan Renja PD	20.429.250	18.667.500	91
	Penyusunan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP Dan LPPD PD	5.836.000	4.529.900	78

No	PROGRAM dan KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
4	Program Pengelolaan Pertanahan	394.840.000	360.650.634	91.34
	Fasilitasi Konflik-Konflik Pertanahan	130.000.000	31.801.900	92
	Penataan Batas Wilayah	47.000.000	46.684.950	99
5	Program Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, Dukungan Manajemen	118.266.925	518.120.656	84.99
	Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	108.733.000	105.732.900	97
	Pembinaan Administrasi Kembaga Kemasyarakatan//	9.533.925	9.531.100	100
	J U M L A H	24.437.843.771	21.690.030.682	88,55

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kota Cimahi dan disusun untuk menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Cimahi.

Penyajian LKIP ini berdasar kepada indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Cimahi yang disusun menurut sasaran strategis sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Cimahi. Secara garis besar dari hasil analisis LKIP Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 dapat disimpulkan:

1. Empat indikator sasaran Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2020, yaitu:
 - a. Nilai AKIP Kota,
 - b. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD),
 - c. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi, dan
 - d. Nilai Rata-rata IKM Kota.
2. Terdapat tiga sasaran yang telah mencapai target yang ditetapkan yaitu Nilai AKIP Kota, Nilai LPPD dan Nilai Rata-rata IKM Kota, dan satu sasaran belum mencapai target yaitu Nilai Indeks Reformasi Birokrasi.
3. Usaha yang dilakukan untuk mencapai target indikator Nilai AKIP Kota adalah:
 - a. Melakukan reviu secara ringkas terhadap RPJMD dan Renstra PD untuk lebih memastikan seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja telah berorientasi pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan masyarakat, memperhatikan keterpaduan perencanaan serta telah melakukan *cascade* kinerja;

- b. *Cascade* kinerja dibangun berdasarkan proses bisnis dalam rangka mencapai berbagai kinerja yang telah dituangkan dalam RPJMD sehingga penyusunan IKU akan mengacu kepada *cascade* kinerja tersebut;
 - c. Melakukan integrasi sistem perencanaan kinerja, sistem penganggaran dan informasi kinerja, untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
 - d. Membangun sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja untuk memastikan validitas capaian kinerja;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi bukan hanya pada pencapaian *output* kegiatan dan penyerapan anggaran namun juga evaluasi program untuk memastikan bahwa program kegiatan merupakan cara yang paling efektif dan efisien sebagai upaya pencapaian sasaran strategis maupun sasaran pembangunan kota;
 - f. Mendorong penyusunan indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP.
4. Usaha yang mendorong tercapainya target indikator nilai LPPD adalah:
- a. Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan penyusun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah se-Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
 - b. Melaksanakan *desk* pencermatan IKK;
 - c. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis pendampingan penyusunan IKK dengan mengundang Kementerian Dalam Negeri.
5. Usaha yang dilakukan untuk mencapai target indikator Nilai Reformasi Birokrasi adalah:
- a. Menetapkan indikator dan target keberhasilan masing-masing area perubahan sehingga hasil yang akan dicapai dapat diukur manfaatnya bagi masyarakat Kota Cimahi;

- b. Meningkatkan implementasi PMPRB dengan mengadakan pertemuan secara berkala dengan para pokja untuk dapat memantau dengan baik perkembangan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
 - c. Melakukan evaluasi kelembagaan yang didasarkan pada kinerja yang akan diwujudkan dalam proses bisnis;
 - d. Mereviu standar kompetensi pegawai yang didasarkan pada kebutuhan struktur organisasi;
 - e. Menetapkan kebijakan studi tiru pada unit kerja yang telah ditetapkan sebagai unit kerja percontohan zona integritas;
 - f. Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan peraturan perundangan untuk memastikan bahwa aturan yang ditetapkan dilaksanakan sesuai dengan alasan ditetapkannya peraturan tersebut;
 - g. Mengintegrasikan semua pelaksanaan reformasi birokrasi dengan kinerja yang akan dicapai sehingga pelaksanaan RB lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh *stakeholder*;
 - h. Meningkatkan komunikasi dengan *stakeholder* terutama dalam rangka menginformasikan segala perbaikan/inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
6. Usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator Nilai Rata-rata IKM Kota adalah:
- a. Adanya dukungan sarana dan prasarana pelayanan publik;
 - b. Komitmen dari pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang prima;
 - c. Pelaksanaan pekerjaan sudah mengacu pada SOP dan SPM;
 - d. Pagu anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan.
7. Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 mengalokasikan belanja langsung sebesar Rp24.437.843.771,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp21.690.030.682,- atau 88,75%. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Kota Cimahi telah

melakukan efisiensi anggaran sebesar sebesar Rp2.747.813.089,- atau 11,25%.

8. Kinerja Sekretariat Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 dapat dikatakan baik namun tetap harus melakukan perbaikan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan tersebut adalah:
- a. Melaksanakan reviu Renstra Sekretariat Daerah Kota Cimahi secara berkala;
 - b. Menyusun rencana aksi Sekretariat Daerah Kota Cimahi pada awal tahun; dan
 - c. Menambah sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan.

Cimahi, Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH,



DIKDIK S. NUGRAHAWAN, S.Si., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720520 199901